

KINI BELAJAR PAJAK JADI MAKIN MUDAH

Tinggalkan kursus Brevet Pajak konvensional,
dan mulailah belajar perpajakan dengan menggunakan
myBREVET, Brevet Pajak MultiMedia pertama di Indonesia.



IKUT BREVET PAJAK A/B DI MANA SAJA, KAPAN SAJA

myBREVET membuat Anda tidak perlu lelah menghadiri kelas brevet pajak seminggu 3 kali sepanjang 3 bulan.

Anda bisa mengulang belajar materi Brevet kapan pun, berlatih soal USKP dan menonton video pembahasan soal di mana saja, dan saat Anda telah benar-benar siap, ikuti TryOut USKP secara online.



SEMUA KARYAWAN ANDA BISA BELAJAR PAJAK TANPA BIAYA SATU SEN PUN

myBREVET membuat perusahaan Anda menghemat biaya kursus perpajakan secara signifikan.

Anda cukup mempunyai 1 unit saja, dan karyawan Anda dapat belajar Brevet Pajak A/B secara bersama-sama atau bergantian.



A top-down view of a wooden desk. On the left, there is a silver laptop with a black keyboard, a yellow notebook, and a black pen. In the top center, there is a white mug with a green handle containing a dark liquid. The background is a dark wood grain surface.

KONTEN YANG LENGKAP DAN MUDAH DIPAHAMI

Konten **myBREVET** disajikan dalam *motion graphic animation* sehingga membuat materi pajak yang cukup berat menjadi menyenangkan dan mudah dipahami.

Terdapat **260+** video materi Brevet A/B, ratusan video pembahasan soal USKP, tutorial cara mengisi SPT online, serta TryOut USKP online, dalam sebuah USB 16GB.

Setiap karyawan yang lulus TryOut USKP akan diberikan Sertifikat TryOut USKP.

SEGERA MILIKI **myBREVET**
DAN BEBASKAN PERUSAHAAN ANDA
DARI MASALAH PAJAK



MATERI VIDEO myBREVET - Brevet Pajak A&B Multimedia Pertama di Indonesia

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

NPWP dan PKP

Pengertian NPWP dan Surat Pengukuhan PKP	1
Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan	2
Tempat Pendaftaran dan Pelaporan	3
Proses pendaftaran NPWP & pelaporan pengukuhan PKP	4
Perubahan data Wajib Pajak	5
Pemindahan Wajib Pajak	6
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif	7
Penghapusan NPWP & pencabutan pengukuhan PKP	8

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian dan fungsi SPT	9
Jenis dan cara pengambilan SPT	10
Syarat Pengisian SPT	11
Penyampaian SPT	12
Pembetulan SPT	13

Pembayaran dan penyetoran pajak

Tempat dan sarana pembayaran dan penyetoran pajak	14
Jangka waktu pembayaran & penyetoran pajak	15
Pembayaran pajak secara elektronik	16
Sanksi administrasi terlambat/tidak membayar pajak	17

Pembukuan dan Pencatatan

Pengertian dan Tujuan Pembukuan	18
Ketentuan Pembukuan	19
Pembukuan dengan Bahasa dan Mata Uang Asing	20
Pencatatan dan Ketentuan Pencatatan	21
Sanksi Administrasi Terkait Pembukuan dan Pencatatan	22

Pengawasan/Pengujian kepatuhan Wajib Pajak

Skema pengawasan dan pengujian kepatuhan Wajib Pajak	23
Jenis data/informasi perpajakan untuk pengawasan kepatuhan pajak	24
Analisis IDLP oleh kantor pajak	25
Jenis pengujian kepatuhan perpajakan	26

Penagihan dan pembayaran utang pajak

Dasar penagihan pajak	27
Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak	28
Penagihan	29
Bunga penagihan	30
Penagihan seketika dan sekaligus	31
Hak mendahului	32

Sengketa pajak

Konsep sengketa pajak	33
Ringkasan alur sengketa pajak	34
Ruang Lingkup Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	35
Proses pengurangan/penghapusan sanksi administrasi	36
Proses penghapusan sanksi bunga penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP	37
Proses pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar	38
Proses pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar	39
Proses keberatan	40
Proses banding di Pengadilan Pajak	41
Proses gugatan di Pengadilan Pajak	42
Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	43

Pidana Fiskal

Ketentuan sanksi pidana fiskal	44
kealpaan melakukan tindak pidana	45
kesengajaan melakukan tindak pidana	46
Kesengajaan melakukan lagi tindak pidana	47
Percobaan melakukan tindak pidana	48
Amnesti pajak	
Definisi amnesti pajak	49
Latar belakang program amnesti pajak di Indonesia	50
Tarif uang tebusan	51
Pasca amnesti pajak	52
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	
Pemotongan Pajak	
Rincian pemotongan PPh Pasal 21	53
Non pemotong pajak	54
Penghasilan yang terkait dengan PPh pasal 21	
Objek PPh Pasal 21	55
Non objek PPh Pasal 21	56
Dasar pemotongan PPh Pasal 21	57
Biaya jabatan, Biaya pensiun, dan iuran pensiun bagi pegawai tetap	58
PTKP, bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai	59
Pengurangan bagi pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya	60
Saat pemotongan PPh Pasal 21	61
Tarif PPh Pasal 21	62
Cara Tarif dan penghitungan PPh atas pasarnngon dan uang manfaat pensiun	
Pegawai Tetap	63
Pegawai Tidak Tetap	64
Tenaga Ahli	65
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	
Pemotong PPh Pasal 23	66
Saat pemotongan PPh Pasal 23	67
Objek dan tarif	68
Non-Objek Pemotongan pph Pasal 23	69
Penentuan imbalan bruto sebagai dasar pengenaan PPh	70
PPh Pasal 23 atas Penghasilan Dividen	71
PPh Pasal 23 atas Penghasilan Bunga	72
PPh Pasal 23 atas Penghasilan Royalti	73
PPh Pasal 23 atas Penghasilan Hadiah	74
PPh Pasal 23 atas Penghasilan Sewa	75
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)	
Karakteristik PPh Pasal 4 (2)	76
Pemotong PPh Pasal 4 (2)	77
Saat pemotongan PPh Pasal 4(2)	78
Maksud dan Tujuan Pemberlakuan PP 46 Th 2013	79
Subjek dan Non Subjek PP 46	80
Objek dan Non Objek PP 46	81
Objek Pemotongan PPh Pasal 4(2)	82
PPh Final atas Bunga Obligasi	83
PPh Final atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh WPOP DN	84
PPh Final atas Bunga Deposito dan Diskonto SBI	85
PPh Final atas Hadiah Undian	86
PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek	87
PPh atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	88
PPh atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan	89
PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	90
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan PP 46	91

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	
Pemotong PPh Pasal 26	92
Objek dan tarif pemotongan PPh Pasal 26	93
Saat pemotongan PPh Pasal 26	94
Tax Treaty	
Pengertian dan Tujuan P3B	95
Kedudukan P3B didalam ketentuan domestik Indonesia	96
Model P3B	97
PAJAK PENGHASILAN PASAL 15	
Pemotong PPh Pasal 15	98
Jasa Penerbangan Dalam Negeri	99
Jasa Pelayaran Dalam Negeri	100
Jasa Penerbangan & Pelayaran Luar Negeri	101
WPLN yang memiliki Kantor Perwakilan Dagang Asing	102
Jasa Maklon Mainan Anak-Anak	103
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	
Objek Dan Non Objek PPh Pasal 22	104
Pemungut PPh Pasal 22	105
Subjek PPh Pasal 22	106
Tarif PPh Pasal 22	107
Saat Terutang PPh Pasal 22	108
Saat Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 22	109
PAJAK PENGHASILAN PRIBADI	
Orang Pribadi sebagai subjek pajak	110
Kewajiban PPh Orang Pribadi	111
Penghasilan Orang Pribadi	112
Non-objek PPh Orang Pribadi	113
Objek PPh Final untuk Orang Pribadi	114
Penggabungan penghasilan global (worldwide income)	115
Pengurangan penghasilan	116
Penghitungan penghasilan netto	117
Penghasilan Kena Pajak	118
Tarif PPh Orang Pribadi	119
Penggabungan Pemisahan Penghasilan Istri dan Suami	120
Pelunasan pajak dalam tahun berjalan	121
Penghitungan pajak pada akhir tahun	122
Pajak Kurang (Lebih) bayar	123
Angsuran PPh Pasal 25	124
PAJAK PENGHASILAN BADAN	
Pengertian PPh Badan	125
Subjek pajak	126
Biaya Dalam PPh Badan	
Biaya Bunga	127
Biaya Entertainment	128
Biaya Pemakaian Telepon	129
Biaya Sumbangan	130
Biaya Yang Dapat Dikurangkan	131
Pembentukan Cadangan	132
Penggantian Imbalan	133
Selisih Kurs	134
Cara menghitung PPh badan	
Penghitungan PPh badan untuk Wajib Pajak dengan tarif PPh Final	135
Penghitungan PPh badan untuk Wajib Pajak dengan norma khusus penghitungan neto	136
Penghitungan PPh badan dengan cara normal	137
Kredit pajak luar negeri	138

PPh Pasal 25 (Angsuran)	139
Kompensasi Kerugian	140
Penyusutan	141
Amortisasi	142
Bentuk dan Fasilitas	143
AKUNTANSI PAJAK	
Pengertian akuntansi pajak	144
Laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak	145
SAK Umum	146
SAK ETAP	147
SAK EMKM	148
SAK Syariah	149
Kerangka konseptual pelaporan keuangan	150
Siklus akuntansi	151
PSAK 46 (Penyesuaian 2014) akuntansi pajak penghasilan	
Perbedaan istilah teknis antara akuntansi dan PPh	152
Sekilas tentang pajak tangguhan	153
PPN & PPnBM	
Karakteristik PPN	154
Pajak objektif	155
PPN merupakan pajak tidak langsung	156
Multi Stage Tax	157
PPN adalah pajak atas konsumsi Umum dalam negeri	158
Mekanisme pengenaan PPN	159
Objek PPN Pasal 4 UU PPN	160
Objek PPN Pasal 16C UU PPN	161
Objek PPN Pasal 16D	162
Non BKP	163
Non JKP	164
Penyerahan BKP	165
Non Penyerahan BKP	166
Tarif PPN	167
Dasar pengenaan pajak (DPP)	168
DPP Nilai Lain	169
Kewajiban membuat Faktur Pajak	170
Faktur Pajak sebagai Bukti pungutan PPN	171
Kode & Nomor Seri Faktur Pajak	172
Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak	173
Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak	174
Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak	175
Tata Cara Penggantian Faktur Pajak	176
Sanksi Administrasi Terkait Faktur Pajak	177
Mekanisme Pengkreditan PM	178
Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP tertentu	179
PM yang tidak dapat dikreditkan	180
PKP belum berproduksi & gagal berproduksi	181
PPN Kurang/Lebih Bayar	182
PPN Tanggung Jawab Renteng	183
Tempat terutang PPN	184
Klasifikasi pemungut PPN	185
Pengecualian transaksi kepada pemungut PPN	186
Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan PPN oleh Pemungut	187
Fasilitas PPN	188
PPN Dibebaskan	189
PPN Tidak Dipungut	190

Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	191
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	
Pengertisan PBB	192
Bumi dan Bangunan Sebagai Objek PBB	193
Objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB	194
Klasifikasi Objek Pajak	195
Subjek pajak dan Wajib Pajak	196
Tahun Pajak dan Saat Terutang	197
Tarif, dasar pengenaan, dan cara menghitung PBB	198
Pendaftaran Objek PBB	199
Penerbitan SPPT atau SKP	200
Tata cara pembayaran dan penagihan	201
Pengurangan utang PBB	202
Objek PBB perkebunan	203
Subjek PBB perkebunan	204
Dasar pengenaan PBB perkebunan	205
Objek PBB perhutanan	206
Subjek PBB perhutanan	207
Dasar pengenaan PBB kehutanan	208
Objek pajak Minerba	209
Subjek PBB Minerba	210
Dasar pengenaan PBB Minerba	211
Objek PBB Migas & Panas Bumi	212
Subjek PBB Migas & Panas Bumi	213
Dasar pengenaan PBB Migas & Panas Bumi	214
PPB sektor lainnya	215
Objek PBB pedesaan dan perkantoran	216
Subjek PBB-P2	217
Dasar pengenaan PBB-P2	218
Tarif PBB-P2	219
BEA MATERAI	
Istilah teknis Bea Materai	220
Objek Bea Materai	221
Dokumen yang tidak dikenakan bea materai	222
saat terutang bea materai	223
subjek bea materai	224
Tata cara pelunasan bea materai	225
Pemeteraian Kemudian	226
Mekanisme Pemeteraian Kemudian	227
Tata Cara Pemeteraian Kemudian	228
Pelunasan Bea materai dengan Pemeteraian Kemudian	229
Sanksi administratif	230
Sanksi pidana	231
Daluarsa	232
Dokumen Perbankan Yang Dikenakan Bea Meterai	233
FORMULIR PERPAJAKAN	
Formulir SPT PPN dan PPnBM	
Format SPT PPN Formulir 1111	234
Formulir SPT masa PPN 1111 DM	235
Formulir SPT masa PPN 1107 PUT	236
Formulir SPT PPh 21	
Format SPT PPh 21 (1721)	237
Bukti Potong A1	238
Bukti Potong A2	239
Bukti Potong Tidak Final	240

Bukti Potong PPh 21 Final	241
Formulir SPT PPh 22	
Format SPT PPh 22	242
Bukti Pemotongan PPh Pasal 22	243
Formulir SPT PPh 23	
Format SPT PPh Pasa, 23	244
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	245
Formulir PPh Pasal 26	
Format SPT PPh Pasal 26	246
Form DGT	247
Formulir PPh Pasal 15	248
Formulir SPT PPh Pasal 4(2)	
SPT PPh Pasal 4(2)	249
Bukti Pemotongan PPh Pasal 4(2)	250
Formulir SPT PPh OP	
SPT 1770	251
SPT 1770 S	252
SPT 1770 SS	253
Formulir SPT PPh Badan	
SPT PPh Badan 1771	254
SPT PPh Badan 1771 Dollar	255
Pendaftaran NPWP	255
Form Pendaftaran NPWP OP	
Form Pendaftaran NPWP Badan	257
TUTORIAL PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK SECARA ONLINE	
Pendaftaran NPWP Secara Online	258
Pelaporan SPT Secara Online	259
SPT PPh OP	260
SPT PPh Badan	261
SPT PPh 21	262
SPT PPh 23	263
SPT PPh	264
Pembuatan Surat Setoran Pajak Secara Online	265
Pembuatan Laporan Pasca Tax Amnesti	266